

Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia

Deny Susanto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta
Email: deny.susanto@kwikkiangie.ac.id^{1*}

Abstrak

Belt Road Initiative (BRI) adalah suatu inisiasi program ekonomi yang memfokuskan pada pembentukan jaringan yang memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi lebih lanjut di pasar internasional, baik secara fisik maupun digital. Berbagai institusi regional tersebut memperlihatkan, bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi regional tersebut memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalisir hambatan tariff dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan militer di Kawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang berfokus pada kebijakan-kebijakan yang menjadi suatu landasan aturan serta penggunaan bahan sekunder berupa kajian ilmiah yang relevan. Diharapkan dalam penelitian ini program BRI dapat digunakan sebagai jembatan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara di tingkat internasional terutama pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keyword: *Belt Road Initiative, Kebijakan, Pertumbuhan ekonomi*

PENDAHULUAN

Abad 21 merupakan abad kebangkitan Cina atau lebih dikenal dengan fenomena *The Rise of China*. Terlebih lagi, Cina juga menunjukkan kapasitasnya sebagai regional power di Asia dan dianggap mampu berperan sebagai hegemoni dunia setelah Amerika Serikat. Kapasitas Cina dapat ditilik dari kebijakan Presiden Cina Xi Jinping dalam merealisasikan program *Belt Road Initiative (BRI)*.

BRI memfokuskan pada pembentukan jaringan yang memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi lebih lanjut di pasar internasional, baik secara fisik maupun digital. BRI sendiri terdiri dari jalur sutra maritim (*maritime silk road*) dan jalur sutra

darat *silk road economic belt* (Drinkwater, 2017).

BRI telah menghubungkan lebih dari 65 negara dengan lebih dari 62% populasi dunia, 35% dari perdagangan dunia, dan lebih dari 31% dari PDB dunia. BRI sendiri fokus pada lima tujuan utama (Drinkwater, 2017), yakni:

- 1) Koordinasi Kebijakan, artinya mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan;
- 2) Pertukaran Budaya, BRI menjadi jembatan dalam mempromosikan *people-to-people connection* dan interaksi yang ramah dengan pemahaman budaya yang baik antarperusahaan di negara-negara jalur

sutra demi menciptakan kerja sama internasional yang efektif;

- 3) Integrasi Keuangan,
BRI dirancang untuk meningkatkan kerja sama moneter dan keuangan untuk menangani resiko keuangan bersama;
- 4) Perdagangan dan Investasi,
Melalui BRI, investasi dan perdagangan lintas batas diharapkan menjadi lebih mudah dan kooperatif demi mempromosikan integrasi ekonomi;
- 5) Konektivitas Fasilitas,
BRI berupaya untuk membangun fasilitas untuk memperluas konektivitas, seperti memperbaiki infrastruktur, membangun berbagai moda transportasi seperti kereta api, mengembangkan pelabuhan, mengembangkan jalan raya, memperbaiki transmisi listrik, dan sebagainya.

Indonesia menjadi salah satu negara besar yang dilewati dalam jalur sutra maritim dan darat. Peningkatan hubungan Indonesia-Cina juga dapat dilihat dalam momen perayaan 65 tahun hubungan bilateral kedua negara. Pada perayaan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-Cina, Presiden Jokowi melakukan lawatan ke Cina pada 25-28 Maret 2015. Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping membahas beberapa hal khususnya sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antara masyarakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi-politik dan derajat hubungan diplomatik kedua negara (Andika, 2017).

Dalam beberapa dekade terakhir, proliferasi institusi regional meningkat,

seperti EU, ASEAN, NAFTA, dan sebagainya. Berbagai institusi regional tersebut memperlihatkan, bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi regional tersebut memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalisir hambatan tariff dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan militer di kawasan. Negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama juga cenderung memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

Dalam beberapa dekade terakhir, proliferasi institusi regional meningkat, seperti EU, ASEAN, NAFTA, dan sebagainya. Berbagai institusi regional tersebut memperlihatkan, bahwa kedekatan geografis merupakan salah satu unsur penting dalam menjalin kerja sama di tingkat regional. Institusi-institusi regional tersebut memudahkan aktivitas perdagangan, meminimalisir hambatan tariff dan nontarif, mengurangi biaya perdagangan, dan lebih mudah untuk memproyeksikan kekuatan militer di kawasan. Negara-negara yang berada dalam kawasan yang sama juga cenderung memiliki kepentingan yang sama dalam menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

Kemitraan Indonesia dan Cina semakin erat sejak dibukanya jalur sutra BRI. Hubungan bilateral Indonesia dan Cina mengalami kemajuan pesat dengan

peningkatan kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2013. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Cina menjadi daya tarik warga kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas manusia dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara kedua negara.

Mekanisme bilateral yang telah terbangun di berbagai bidang dan tingkatan kiranya akan mampu menampung dinamika tersebut, disertai harapan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui cara-cara damai, sederajat dan saling menguntungkan. Sementara itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina sebagai mitra dagang utama dan sumber investasi potensial diwarnai dengan upaya Pemerintah Indonesia mendorong investasi Cina pada proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Indonesia dan upaya kedua negara memajukan liberalisasi ekonomi untuk akses bagi produk-produk Indonesia ke Cina dan begitu juga sebaliknya.

Realisasi investasi asing dari Cina sepanjang semester pertama 2018 mencapai USD 1,34 miliar atau setara Rp 18 triliun. Investasi tersebut merupakan 8,8% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia sebesar USD 15,2 miliar. Menurut BKPM, investasi atau PMA paling besar di Indonesia selama periode Januari-Maret 2019

adalah di sektor listrik, gas dan air, transportasi, dan telekomunikasi. Listrik, gas dan air dengan investasi Rp 117,5 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 94,9 triliun, pertambangan Rp 73,8 triliun. Selanjutnya ada sektor industri makanan Rp 68,8 triliun dan perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp 56,8 triliun. Secara keseluruhan, nilai investasi dari negeri tirai bambu berada di urutan ketiga terbesar (Badan Kordinasi Penanaman Modal RI, 2017).

Ekspansi perdagangan industri dan teknologi Cina telah menyebar di berbagai belahan dunia. Produk-produk industri manufaktur Cina juga sangat diminati masyarakat dunia, karena Pemerintah Cina memberlakukan pengurangan tarif atau bea cukai lainnya terhadap produk-produk yang menopang eksistensi ekspor Cina di pasar internasional.

Hal ini kemudian menjadikan Cina memerlukan sumber daya alam seperti minyak dan material mentah lainnya untuk tetap dapat menghasilkan barang-barang tersebut bagi pabrik-pabrik yang memproduksinya. Hal tersebut dibuktikan dengan impor minyak Cina yang mencapai 10 ribu barel/hari untuk mencukupi kebutuhan domestik. Bahkan Pemerintah Cina menggelontorkan USD 77 miliar pada tahun 2019 untuk kegiatan eksplorasi minyak demi menggenjot produksi minyak domestik (Ed Hirs, 2019).

Kemampuan negara untuk bekerja sama dan melembagakan kerja sama lebih

banyak pada bidang ekonomi dibandingkan dengan dimensi keamanan. Sementara merujuk pada liberalis institusional, yaitu kemampuan lembaga internasional untuk memfasilitasi kerja sama di tengah masalah ekonomi dan keamanan. beberapa faktor determinan pembentukan kerja sama internasional, yaitu peran lembaga/institusi domestik dan kedekatan geografis. analisis lebih komprehensif mengenai keterkaitan kerja sama dan demokrasi bahwa negara-negara dengan politik domestik yang serupa cenderung bersekutu satu sama lain dan negara-negara demokratis cenderung memiliki kerja sama yang relatif lebih baik (Max B Gallop, 2016).

Institusi keuangan Cina dan bank komersial asing juga selanjutnya menjadi pemain penting dalam memfasilitasi keuangan jalur sutra BRI. Menyikapi perkembangan yang ada saat ini, Indonesia semestinya dapat memperoleh lebih banyak investasi di masa depan, khususnya di bidang infrastruktur guna membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa proyek seperti infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut dapat menjamin adanya produksi berkelanjutan di bidang sumber daya maritim. BRI menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat hubungan dengan Cina dan menjamin tersedianyapendanaanbagiproyek-proyek infrastruktur. Seperti disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia harus secara proaktif turut serta dalam inisiatif BRI, terutama

untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan melakukan hal tersebut, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari BRI, untuk selanjutnya mampu memimpin pertumbuhan ekonomi terutama di kawasan ASEAN (HSBC, 2017).

Menurut Immanuel Kant, kerja sama adalah pilihan paling rasional yang dapat diambil oleh sebuah negara. Pada sistem yang anarki, negara akan memilih pilihan yang paling rasional guna mencapai kepentingan nasionalnya. Negara memilih bekerja sama sebab hal tersebut dapat memenuhi kepentingannya. Dibandingkan dengan konflik yang diungkapkan oleh Realis, kerja sama tampaknya lebih rasional. Selain itu, konsep "*Prisoner's Dilemma*" juga digunakan dalam Neo Liberalisme di mana kerja sama menjadi penentunya, Negara akan mendapat keuntungan jika hanya salah satu negara yang cacat, tetapi mereka akan rugi jika keduanya cacat (Pevehouse & Goldstein, 1919).

Neo Liberalisme menyamakan kepentingan nasional suatu negara dengan upaya untuk memperoleh keuntungan melalui peningkatan kekuatan kapitalis. Berdasarkan logika pasar mengenai efisiensi, kompetisi serta keuntungan yang didapat melalui sistem kapital akan meningkatkan *power* suatu negara (Bockman, 2013).¹ Negara dengan sistem perekonomian Neo Kapitalis seperti Tiongkok memanfaatkan kebijakan pro-pasar dalam negara sosialis, perusahaan swasta,

hukum represif yang terus berkembang serta budaya konsumen untuk mencari keuntungan. Selain itu, pasar global adalah arena “bermain” bagi negara penganut aliran Neo Liberalisme. Terdapat pola dinamis yang menghubungkan negara-negara di dunia dalam sistem Neo Kapitalisme tersebut. Negara model ini bahkan menggunakan pilihan berdasarkan kalkulasi keuntungan kapital guna menyelesaikan masalah dalam hubungan internasional-nya (Ong, 2007).

METODE

Dari perspektif Pemerintah Indonesia secara umum, kerja sama yang dijalin antara Indonesia dan Cina di BRI erat kaitannya dengan beberapa faktor determinan yang mencerminkan kepentingan ekonomi-politik kedua belah pihak. Cina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah AS. Maka dari itu, penting untuk memiliki kerja sama perdagangan yang baik dengan Cina. Namun, untuk dapat memperoleh manfaat dari investasi terkait BRI, Indonesia harus mengatasi sejumlah masalah yang berpotensi menghambat investasi asing terutama dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembebasan lahan yang sangat lambat dan pekerja asing. Terbukanya akses pekerja asing Cina masuk ke Indonesia menjadi masalah yang sensitif bagi warga yang berdomisili di daerah pembangunan proyek. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja asing harus mengikuti semua peraturan dan ketentuan tentang ketenagakerjaan.

Menurut Breuer dalam *Stiftung Asienhaus* (salah satu jurnal akademik Jerman), BRI memiliki visi dalam membangun perekonomian negara-negara yang dilewati jalur sutra, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Bahkan Pemerintah Cina juga turut mendukung African Union’s Agenda 2063 untuk mencapai target-target SDGs dan turunannya. Namun Breuer lebih jauh mengamati, bahwa hubungan kerja sama antara Cina dan Afrika adalah tidak sepadan karena eksploitasi sumber daya alam Afrika oleh Cina dan Afrika hanya mengekspor bahan-bahan mentah ke Cina. Namun sebagian kelompok akademisi yang lain juga menelaah, bahwa Afrika memiliki banyak keuntungan dari kehadiran dan pertumbuhan Cina di benua hitam tersebut, meskipun bukan tanpa efek negatif. Peningkatan perdagangan dan link investasi yang sangat menjanjikan karena memiliki potensi untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan mempertahankan keuntungan ekonomi (Breuer, 2017).

Friedrich mengungkapkan bahwa Neo Liberalisme memandang perlunya peran negara-meskipun hanya sedikit-untuk menjaga keseimbangan pasar. Negara perlu melindungi properti pribadi, menjaga ketertiban dengan membuat kebijakan yang dapat melindungi pasar. Neo Liberalisme tidak dimaksudkan untuk menghilangkan peran negara secara keseluruhan, tetapi menempatkan negara pada posisi yang tepat

dalam sistem perekonomian (Bockman, 2013).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif berupa aturan dan kebijakan (*policy*) dan kajian bahan sekunder yang diperoleh dari bahan sekunder seperti buku dan bahan penelitian ilmiah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan konsep kerja sama internasional, penulis menyoroti, bahwa kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam program BRI tidak dapat dipisahkan dari berbagai negara lain yang terlibat dalam BRI. Keduanya dapat bermitra di berbagai proyek dengan pendanaan dari kedua belah pihak ataupun melibatkan negara dan institusi lain.

Kemitraan antara Indonesia dan Cina. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Cina juga semakin mendorong keduanya untuk bekerja sama. Meski begitu, beberapa ekspertis melihat sisi positif dan negatif BRI terhadap pembangunan nasional Indonesia.

Diperlukan adanya suatu upaya yang serius dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggalakkan program peningkatan kapasitas, seperti program pendidikan dan program pengembangan keterampilan SDM yang spasial sesuai dengan karakteristik daerah.

Sementara dari sisi politik dan kebijakan, Pemerintah Indonesia berusaha menjaga hubungan diplomatik dengan Pemerintah Cina dikarenakan berbagai kerja sama ekonomi yang telah dipaparkan

sebelumnya. Aspek geostrategis dan geopolitik akan sangat menentukan hubungan diplomatik kedua negara. Indonesia sebagai salah satu pemasok bahan baku/SDA terbesar Cina dan negara terbesar di ASEAN memiliki sentralitas tersendiri dalam bermitra dengan Cina. Namun Indonesia juga akan memperoleh berbagai tekanan politik dari internal dan eksternal melalui program BRI untuk “menjaga” jarak ekonomi dan politik ke Cina.

Berkaitan dengan masalah pengaruh inisiasi BRI terhadap perekonomian Indonesia, teori Neo Liberalisme menjelaskan mengenai pentingnya hubungan kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Pada dasarnya, inisiasi BRI memiliki dimensi politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, Tiongkok menginisiasikan pembangunan BRI sebagai salah satu upaya politiknya guna menjadi negara yang berpengaruh dan mengamankan posisinya di Asia. Sedangkan, dalam bidang ekonomi, BRI tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional serta memajukan ekonomi Tiongkok. Sedangkan, bagi Indonesia, inisiasi BRI adalah tantangan baru bagi posisi Indonesia dalam pemolitikan serta perekonomian dunia. Jika Indonesia mampu menghadapi tantangan tersebut, maka *Bargaining Power* Indonesia di dunia juga akan meningkat.

Selain itu yang terpenting adalah pelaksanaan implementasi tata Kelola pada perusahaan baik publik maupun privat (swasta) yang tidak hanya mengandalkan

domestifikasi produk secara formal namun mampu memberikan sumbangsih nyata sisi investasi, tidak hanya sebagai Menara gading dalam pelaksanaan tata kelolanya (Susanto, 2020) namun memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Program BRI merupakan manifestasi kebijakan luar negeri Cina yang memiliki implikasi positif dan negatif, tergantung pada perspektif negara- negara yang terlibat di dalamnya. Kebijakan tersebut seperti dua sisi mata uang.

Di satu sisi, program BRI dapat digunakan sebagai jembatan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara di tingkat internasional. Pembangunan juga akan semakin terakselerasi di berbagai negara berkembang. Indonesia misalnya, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur, pembangunan moda transportasi darat dan laut, pembangunan desa dan berbagai program pembangunan lainnya. Maka dari itu, BRI menjadi wadah yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui proyek- proyek pembangunan.

Namun di sisi lain, program BRI juga memberatkan negara berkembang yang nantinya harus mengembalikan berbagai bentuk pinjaman dari Pemerintah Cina. Sektor-sektor strategis yang belum berdaya saing tinggi juga akan semakin tenggelam dengan adanya perusahaan- perusahaan Cina

dan berbagai produk industri Cina yang dengan bebas masuk ke Indonesia sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Maka dari itu, kerja sama kedua belah pihak sebaiknya dapat memberikan manfaat untuk negara dan bangsa Indonesia. Kemudian, berbagai implikasi proyek BRI juga sebaiknya dievaluasi lebih dalam, sehingga tidak menimbulkan konflik internal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M. T., & Aisyah, A. N. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?. *Indonesian Perspective*, 2(2), 161-179.
- Badan Kordinasi Penanaman Modal RI. (2019). *Perkembangan_Realisasi PMA Berdasarkan Sektor TW I 2019*.
- Bockman, J. (2013). *Neoliberalism. Contexts*, 12(3), 14-15.
- Breuer, J. (2017). *Two Belts, One Road?-The role of Africa in Chinas's Belt & Road initiative*.
- Drinkwater, L. (2017). *The Belt and Road Initiative: Country Profiles*. *Lehman Brown International Accountants*, 6, 1-4.
- Ed Hirs. (2019). *China is Betting Big on Increasing Oil Production*. *Forbes*.
- HSBC. (2017). *Belt and Road Initiatives untuk Memperkuat Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Tiongkok*. HSBC.

- Max B Gallop. (2016). Endogenous networks and International cooperation. *Journal of Peace Research*, 53(3), 314–315.
- Ong, A. (2007). Neoliberalism as a mobile technology. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32(1), 3–8.
- Pevehouse, J. C., & Goldstein, J. S. (1919). *Internasional Relations*.
- Susanto, D. (2020). Indonesian Good Corporate Governance In An Ivory Tower: Communication Ethics Perspectives. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 8(2), 100–105